



News Title : Riau Berpotensi Jadi Rujukan	
Media Name : Bisnis Indonesia	Journalist : Arif Gunawan
Publish Date : 30 May 2024	Tonality : Positive
News Page : 10	News Value : 168,750,000
Resources : Yugieandy T. Saputra (Direktur ICDX)	Ads Value : 56,250,000
Section/Rubrication : Portofolio	Topic : Bursa CPO

| BURSA CPO |

Riau Berpotensi Jadi Rujukan

Bisnis, PEKANBARU — Peran Provinsi Riau sebagai salah satu daerah dengan luas lahan kebun sawit terbesar di Indonesia diharapkan turut membentuk harga pasar fisik *crude palm oil* atau CPO.

Melalui Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), Indonesia berkeinginan menjadi rujukan untuk menentukan pergerakan harga CPO di tingkat global.

ICDX bekerja sama dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengadakan sosialisasi Bursa CPO di Pekanbaru, Riau.

Menurut Direktur ICDX Yugieandy T. Saputra, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari peran ICDX sebagai *Self Regulatory Organization* (SRO) dalam perdagangan pasar fisik CPO.

“Kami menyiapkan infra-

struktur perdagangan fisik CPO sesuai harapan pemerintah dan memberikan kemudahan bagi pelaku industri kelapa sawit di Indonesia,” ujarnya Rabu (29/5).

Yugieandy menyatakan kegiatan sosialisasi di Pekanbaru adalah langkah proaktif mengingat provinsi Riau memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia.

“Kami berharap para pelaku usaha kelapa sawit dapat memanfaatkan bursa sebagai tempat perdagangan pasar fisik CPO, yang pada akhirnya akan membantu membentuk harga CPO di Indonesia serta menjadi harga acuan untuk ekspor,” katanya.

Hingga kini, katanya, sudah ada 49 perusahaan yang menjadi anggota bursa CPO di ICDX.

Data Kementerian Pertanian pada 2023 menunjukkan

bahwa Provinsi Riau memiliki lahan kelapa sawit seluas 3,49 juta hektare, setara dengan 21% dari total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia sebesar 16,83 juta hektare.

Hal ini menjadikan Riau sebagai provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, diikuti oleh Kalimantan Tengah dengan luas 2,04 juta hektare dan Sumatra Utara dengan luas 2,02 juta hektare.

Bursa CPO Indonesia didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Pada Oktober 2023, Bappebti memberikan persetujuan kepada ICDX menjadi penyelenggara Bursa CPO dengan mekanisme perdagangan dibagi dalam tiga sesi berdasarkan zona dan pelabuhan penyerahan. (Arif Gunawan)